



~~Gagasan & Inovasi /~~ Ulasan (delete yang tidak perlu)

Efektivitas Pembelajaran Virtual pada Pelatihan Dasar CPNSD di Masa Pandemi Covid 19

*Cepi Safrul Alam¹

¹ Widyaiswara Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten

(Diterima 23 Agustus 2020; Direvisi 24 Agustus 2020; Disetujui 31 Agustus 2020; Diterbitkan 8 September 2020)

Abstract: *This scientific paper is in the form of a review. The author wants to review the effectiveness of learning using face-to-face applications using internet technology. The method used is literature study method. The data used is secondary data, so the authors do not need to look for data directly to the data source. Based on the author's analysis, face-to-face learning for CPNS basic training participants can be done effectively. This can be proven by the implementation of distance learning, in which participants do not need to come to the training venue but through their workplace or from home if the work from home policy applies. From this empirical evidence, it shows that the implementation is running smoothly because of adequate infrastructure, enabling technology, capable human resources and stable internet connection. In conclusion, virtual face-to-face learning in CPNS basic training can run effectively.*

Keywords: CPNS, virtual learning, zoom, circular, LAN RI

Author: Cepi Safrul Alam, E-mail: cepiawiwulung@gmail.com , Tel. +62-0811-125-438.

Pendahuluan

Pelatihan dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah lingkup Provinsi Banten tahun 2021 akan dilaksanakan setelah rangkaian seleksi telah seluruhnya rampung dilaksanakan. Seleksi CPNSD tahun ini relatif lebih lama karena ketika proses berjalan, Indonesia terdampak pandemi corona virus disease 19 (covid19). Bukan hanya pelaksanaan seleksi CPNSD tetapi hampir semua aspek kehidupan terdampak secara global. Tidak ada ahli yang secara pasti menyampaikan informasi kapan pandemi covid 19 akan berakhir sampai ditemukannya vaksin. Tentu keadaan ini membuat semua pihak prihatin karena bagaimanapun semua sektor yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, yaitu ekonomi, perdagangan, pelayanan publik (pendidikan dan pelatihan terutama) harus terus berjalan. Kelumpuhan sektor ini sangat berdampak luas dan kritis.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan tentang pengaturan pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Dokumen bisa diunduh di <https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi%20Edukasi/20200807-pembelajaran-di-masa-covid-19-2.pdf>. Dalam kebijakan ini diatur pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi corona ini. Bagaimana melaksanakan pembelajaran di zona merah, zona kuning dan zona hijau. Penentuan zonasi pun tidak boleh sembarangan namun merujuk pada kebijakan yang dibuat dan diunduh di <https://covid19.go.id/peta-risiko>. Sedangkan untuk wilayah Republik Indonesia kepulauan kecil dan terpencil didasarkan pada pemetaan yang dibuat oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota setempat.

Bagaimana dengan pembelajaran yang dilaksanakan di tempat-tempat pelatihan milik pemerintah, misalnya Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Apakah pembelajaran tatap muka ditiadakan ataukah dilaksanakan secara virtual. Pertanyaan ini mengemuka karena sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa CPNSD untuk dapat diangkat menjadi PNS, dalam kurun waktu satu tahun setelah lulus seleksi wajib mengikuti pelatihan dasar CPNS.

Seperti apakah pola pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi ini, lembaga pembina pelatihan memiliki kuasa dan wewenang untuk pengaturan, yaitu Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa LAN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian, pendidikan dan pelatihan ASN. Non kementerian artinya bahwa lembaga tersebut merupakan lembaga negara yang langsung berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

LAN memiliki fungsi pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai ASN, pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya, pengkajian terkait dengan kebijakan dan manajemen ASN, dan melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya (Gresnews.com, 2016).

Mengacu pada ketentuan itu, LAN RI mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 8/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19). Tujuan dari dikeluarkannya surat edaran ini adalah

untuk menyebarkan Panduan Teknis sebagai acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan, Peserta dan Tenaga Pelatihan dalam menyelenggarakan Pelatihan pada masa pandemi COVID-19. Sebelum surat edaran ini disebarluaskan, ada baiknya jika kebijakan ini diikuti dengan penyusunan kurikulum darurat tentang pelaksanaan diklatsar CPNS 2021. Dalam kurikulum darurat ini dimuat semua hal terkait pelaksanaan proses pelatihan dasar, yang merupakan pendidikan pembentukan sosok pegawai negeri sipil ideal. Sebagaimana diketahui pendidikan dan pelatihan merupakan pembentukan 3 (tiga) komponen pembentuk kompetensi yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku. Jika, dimasa pandemi covid 19, pelatihan dasar dilaksanakan, akan seperti apa sikap dan perilaku akan dinilai.

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan kurikulum darurat latihan dasar CPNS, uji terbatas atau uji petik harus dilakukan untuk menguji efektivitasnya. Uji petik ini juga sebagai persiapan seluruh lembaga pelatihan beralih ke **pelatihan.4. Pelatihan.4** adalah pelatihan yang berbasis teknologi informasi dengan bantuan *internet of things* dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Sebagai rujukan ada beberapa lembaga yang telah melaksanakan pembelajaran pelatihan dasar, sebagai contoh sebanyak 90 orang Calon Pegawai Negeri Sipil dari unit Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengikuti pembelajaran melalui aplikasi Zoom. Langkah ini diambil karena penundaan Pelatihan Dasar CPNS berarti penundaan pengangkatan peserta sebagai Aparatur Sipil Negara, yang tentunya akan merugikan peserta pelatihan (BDK, 2020).

Menurut laman Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, teknis pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode II dapat dirangkum sebagai berikut.

1. Pembelajaran tatap muka antara peserta dengan pengajar melalui aplikasi Zoom dilakukan selama 3 JP, dilanjutkan dengan penugasan, quiz online, dan pembahasan tugas.
2. Agenda pembimbingan dan seminar Rancangan Pelaksanaan Aktualisasi dilaksanakan secara virtual.
3. Evaluasi peserta terbagi menjadi dua, yaitu ujian mandiri dan ujian online (BDK, 2020).

Selain Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, peserta latsar dari kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan seminar aktualisasi online karena terhambat pandemi covid 19. Ujian dilaksanakan secara virtual atau online dengan menggunakan media video conference zoom (AdminDatadanInformasi, 2020).

Pelaksanaan pembelajaran online sah secara hukum. LAN RI melalui surat edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 8/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) menawarkan 3 alternatif pembelajaran di masa pandemi, khususnya peserta latihan dasar CPNS. Oleh karena itu, lembaga pelatihan harus

mengantisipasi alih teknologi kepada sumber daya manusia yang dimilikinya serta sumber daya teknologi yang akan digunakan. Kedua hal ini sangat penting dan strategis untuk dilakukan persiapan-persiapan agar dapat meminimalisir kendala yang mungkin terjadi. Selain edaran LAN RI, hasil penelitian (Handarin, 2020) Pembelajaran virtual merupakan salah satu solusi untuk menerapkan social distancing guna mencegah mata rantai penyebaran wabah covid 19. Dalam pembelajaran virtual membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, seperti laptop, komputer, smartphone dan jaringan internet.

Analisa

Dari paparan di atas dapat diulas beberapa hal terkait pelaksanaan pembelajaran virtual bagi peserta latsar CPNS. Mengingat, status CPNS memiliki masa *void* yaitu satu tahun. Jika masa *void* ini habis maka CPNS tidak dapat diangkat menjadi PNS. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana pembelajaran virtual atau online membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak berbayar. Untuk itu diperlukan persiapan matang dalam perencanaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Perangkat keras dan perangkat lunak harus mendapatkan rekomendasi dari ahli di bidang teknologi informasi. Perangkat keras dimaksud adalah komputer laptop dengan spesifikasi minimal Core i5 dan memori 8 gigabyte (GB) dengan grafik resolusi tinggi, kamera resolusi tinggi. Sedangkan perangkat lunak yang digunakan dapat dipertimbangkan aplikasi berbayar dengan pertimbangan bandwidth yang digunakan juga terhitung ringan. Server penyedia jasa aplikasi juga harus menjadi perhitungan agar ketika diakses banyak user masih stabil.

2. Teknologi yang Digunakan

Teknologi yang digunakan harus teknologi mutakhir atau high-end yang terus update untuk menghadapi serangan malware jahat ketika komunikasi sedang berlangsung terutama keamanan data pengguna. Banyak aplikasi tatap muka maupun kelas daring atau virtual yang layak dipertimbangkan. Sebagai contoh, zoom meeting adalah aplikasi yang paling banyak digunakan. Namun untuk versi gratisnya hanya 40 menit saja. Untuk waktu yang lebih lama, pengguna harus membayar jasa layanan untuk satu host dan 100 user pelanggan membayar 270 ribu rupiah via credit card atau paypal. Dengan layanan premiumnya, zoom telah menambal bug yang ramai dibicarakan terkait pencurian data dan serangan hacker. Hampir dapat dipastikan zoom termasuk

aplikasi yang ringan dan familiar untuk digunakan semua kalangan. Sebetulnya banyak penyedia aplikasi gratis dan berbayar lainnya, pilihan diserahkan pada kenyamanan pengguna.

3. Sumber Daya Manusia Penyelenggara

Faktor penentu lancarnya pelaksanaan tatap muka virtual adalah kualitas SDM penyelenggara pelatihan, selain koneksi internet. Kepiawaian penyelenggara dalam menyelenggarakan tatap muka virtual sangat menentukan mulai pembagian ruangan (breakout rooms, mematikan dan menghidupkan mikropon, membagi undangan online, mengatur apakah guest langsung masuk atau masuk dulu ke ruang tunggu atau ditolak menggunakan batas waktu, itu semua yang melakukan adalah petugas yang diberikan kepercayaan oleh penyelenggara karena kefahamannya tentang teknologi yang digunakan. Sekalipun online namun kelengkapan tatap muka harus disediakan, yaitu daftar hadir peserta dan narasumber. Penyelenggara dapat menggunakan google formulir. Namun, jika diperlukan tanda tangan elektronik maka penyelenggara dapat menggunakan zoho form berbayar untuk 1000 user. Aplikasi ini sangat bermanfaat dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka virtual.

4. Konektivitas Jaringan Internet

Penulis menyadari bahwa stabilitas jaringan internet di Indonesia masih jauh dari sempurna, Namun, upaya ke arah persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka virtual wajib dilakukan. Pertama, beli paket indihome dengan bandwidth tinggi atau provider swasta yang memiliki layanan internet berkecepatan tinggi. Kedua, gunakan penggantian password yang biasa digunakan dengan password baru khusus untuk pembelajaran tatap muka virtual agar stabilitas internet terjaga. Ketiga, hubungi PT Telkom terdekat untuk membeli Virtual Private Network (VPN) untuk akses khusus zoom agar pada waktu pelaksanaan pembelajaran lancar tanpa ada kendala.

Dengan merujuk pada analisa di atas, jika pembelajaran di masa pandemi covid 19 ini dilaksanakan secara virtual akan memberikan dampak positif terhadap terpenuhinya tujuan yang telah ditetapkan bahwa anggaran untuk akomodasi dapat dihemat. Dengan demikian, dapat berkembang paradigma baru dalam pembelajaran di pelatihan CPNS maupun PNS yaitu perubahan sikap dan perilaku serta etika belajar secara virtual.

Kesimpulan

Kesimpulan dari tulisan ulasan ini adalah perlunya dasar hukum dalam pelaksanaan pembelajaran pelatihan dasar CPNS secara virtual atau online. Selain itu, agar pelaksanaan efektif dan efisien harus dibuatkan panduan rinci tentang pelaksanaannya yang nantinya dijadikan rujukan oleh lembaga pelatihan di seluruh Indonesia. Faktor penentu suksesnya pelaksanaan pembelajaran

pelatihan dasar CPNS adalah tersedianya sarana dan prasarana yang sangat memadai, teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan pembelajaran virtual, tersedianya sumber daya manusia yang terlatih dan berkualitas dan melek information technology (IT), serta tersedianya koneksi internet berkecepatan tinggi. Dengan kata lain, pembelajaran tatap muka untuk pelatihan dasar CPNS dapat dilaksanakan dengan efektif***

Ucapan terimakasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten yang telah memberikan rekomendasi terhadap karya tulis ini sehingga dapat dimuat di media sebagai bentuk pengembangan profesi kewidyaiswaraan. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada reviewer dan redaktur Jurnal Lingkar Widyaiswara yang telah sudi membaca dan mengedit karya tulis yang penulis susun.

Daftar Pustaka

- AdminDatadanInformasi. (2020, Juni 30). *UJIAN ONLINE SEMINAR EVALUASI PELAKSANAAN AKTUALISASI PESERTA LATSAR KABUPATEN PASURUAN MENGGUNAKAN VIDCON DI TENGAH PANDEMI COVID-19*. Diambil kembali dari <http://bkppd.pasuruankab.go.id/berita-943-ujian-online-seminar-evaluasi-pelaksanaan-aktualisasi-peserta-latsar-kabupaten-pasuruan-menggunakan-vidcon-di-tengah-pandemi-covid-19.html>:
<http://bkppd.pasuruankab.go.id/>
- BDK. (2020, April 6). *Sempat Dihentikan, Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode II Dilanjutkan Secara Virtual*. Diambil kembali dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-yogyakarta-sempat-dihentikan-pelatihan-dasar-cpns-golongan-ii-periode-ii-dilanjutkan-secara-virtual-2020-04-06-bca9935a/>:
<https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-yogyakarta-sempat-dihentikan-pelatihan-dasar-cpns-golongan-ii-periode-ii-dilanjutkan-secara-virtual-2020-04-06-bca9935a/>
- Gresnews.com. (2016, Desember 7). *Tugas dan Wewenang Lembaga Administrasi Negara*. Diambil kembali dari http://www.gresnews.com/berita/tips/112206-tugas-dan-wewenang--lembaga-administrasi-negara/?__cf_chl_jschl_tk__=b408d408857693a31e6070fe9cf80aef1d8981ec-1599371038-0-AfLEfGjxyKOzinP172gZ4krk854NrcQXtGvX7cMwm4dXWGegya-ZKfWqGvflVKvScze67fkzwrzhYOXCP7fZhKo_E: http://www.gresnews.com/berita/tips/112206-tugas-dan-wewenang--lembaga-administrasi-negara/?__cf_chl_jschl_tk__=b408d408857693a31e6070fe9cf80aef1d8981ec-1599371038-0-AfLEfGjxyKOzinP172gZ4krk854NrcQXtGvX7cMwm4dXWGegya-ZKfWqGvflVKvScze67fkzwrzhYOXCP7fZhKo_E

Handarin, O. I. (2020). Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From Home (SFH) Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP) Volume 8, Nomor 3, 2020*, 496-503.

Hasibuan. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: ---.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 8/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19)

<https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi%20Edukasi/20200807-pembelajaran-di-masa-covid-19-2.pdf>.

<https://covid19.go.id/peta-risiko>.

Abstrak: Karya tulis ilmiah ini berbentuk ulasan. Penulis ingin mengulas tentang efektivitas pembelajaran menggunakan aplikasi tatap muka jarak jauh menggunakan teknologi internet. Metode yang digunakan adalah metode studi pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder sehingga penulis tidak perlu mencari data langsung ke sumber data. Berdasarkan analisa penulis pembelajaran tatap muka bagi peserta pelatihan dasar CPNS dapat dilakukan secara efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah dilakukannya pembelajaran jarak jauh, yaitu peserta tidak perlu datang ke tempat pelatihan melainkan melalui tempatnya bekerja atau dari rumah jika diberlakukan kebijakan bekerja dari rumah. Dari bukti empirik ini menunjukkan pelaksanaan berjalan lancar karena sarana prasarana memadai, teknologi memungkinkan, SDM mumpuni serta koneksi internet berjalan stabil. Kesimpulannya pembelajaran tatap muka virtual dalam pelatihan dasar CPNS dapat berjalan efektif.

Kata Kunci: CPNS, pembelajaran virtual, zoom, surat edaran, LAN RI